

**LAPORAN KINERJA (LKj)
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2021**



***MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI
PEMBANGUNAN PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA***

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak-Nya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selaku leading sektor pembangunan di bidang pertanian mempunyai tugas yang strategis dalam menunjang roda perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mengingat pertanian dalam arti luas mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tentu dibutuhkan perhatian yang lebih serius untuk pembangunan pertanian kedepan.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2021 adalah cerminan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa selain beberapa keberhasilan yang telah dicapai masih terdapat kendala atau permasalahan yang dihadapi, baik secara teknis, sumberdaya manusia, maupun manajemen dan administrasi. Namun demikian harapan kita semuanya untuk selalu meningkatkan kinerja, melalui pemanfaatan peluang yang tersedia, mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang ada untuk melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Dalam penyusunan laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 tentu tidak sendirian, namun demikian berkat kerjasama dari berbagai pihak, baik internal Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri atas Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Penyuluhan dan Sekretariat, untuk itu kami apresiasi dengan ucapan terima kasih yang sebesar-sebesarnya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat terwujud sebagai representasi hasil kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura



Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021. Namun demikian kami sangat menyadari, penyusunan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kami menerima saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan penyusunan di tahun mendatang. Harapan kami semoga substansi dari Laporan Kinerja (LKj) ini dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang selanjutnya bisa dijadikan bahan evaluasi, serta masukan pengambil kebijakan khususnya dan pembaca umumnya.

Dan sebagai kalimat akhir pengantar Laporan Kinerja (LKj) ini kami mengajak seluruh pihak yang ikut andil dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk bekerja lebih baik, amanah, ikhlas dan dengan semangat yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian di masa yang akan datang.

Kuala Tungkal, Januari 2022
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ir. H. ZAINUDIN, MM
NIP. 19661024 199203 1 005



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada Tap MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama perencanaan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026. Kemudian ditindak lanjuti dengan perumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi (1) Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan, (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan, (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan, (4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan; dan (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 yang menjabarkan Visi dan Misi kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, salah satu diantara agenda dan prioritas pembangunan tersebut adalah pembangunan di bidang pertanian, terutama untuk memacu meningkatkan ekonomi masyarakat.



Selanjutnya untuk mendukung agenda pembangunan nasional, serta menjawab tantangan dunia pertanian dalam arti yang luas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan 2 (dua) Tujuan, yaitu :

1. Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dan
2. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Dari tujuan yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan dalam bentuk penetapan sasaran strategis yang selanjutnya untuk menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta menetapkan alokasi sumber daya yang ada, baik dari sumberdaya manusia maupun anggaran. Dengan berakhirnya tahun anggaran, berakhir pula Program dan Kegiatan dalam 1 (satu) tahun, maka sebagai konsekuensi logis dilakukan pengukuran atas target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dapat dikategorikan "**SANGAT BAIK**". Untuk indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, realisasi yang dicapai melebihi target. Untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produksi Tanaman Pangan secara keseluruhan capaian kinerja yang dihasilkan juga melebihi target (150,25 dengan Kategori SANGAT BAIK). Begitupun untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produksi hortikultura, secara rata-rata, capaian kinerja yang dihasilkan juga melebihi target (148,22 dengan Kategori SANGAT BAIK).

Dari segi akuntabilitas keuangan, total alokasi anggaran belanja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah sebesar Rp. **19.150.769.687** (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah*). Dan realisasi anggaran selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar sejumlah Rp. **17.111.761.390** (*tujuh belas miliar seratus sebelas juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*) atau terealisasi sebesar 89,35%.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSKLUSIF	III
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VI
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Maksud dan Tujuan	I-3
1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	II-6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja.....	III-13
3.2 Akuntabilitas Keuangan.	III-15
BAB IV PENUTUP	IV-21
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2021 adalah pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Jabung Barat Tahun 2021-2026. Pada periode ini, pertanian masih mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan di bidang pertanian, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat selalu berusaha untuk melakukan penataan manajemen melalui pengembangan sumberdaya aparatur. Salah satunya melalui penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel sesuai dengan prinsip *Good Governance and Clean Government*, yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Guna mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung-jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate* agar penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil-guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan daerah di bidang pertanian dituntut untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan penambahan penduduk dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing produk-produk pertanian, agribisnis, optimalisasi peningkatan sumber daya lokal dan peningkatan kesejahteraan petani.



Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai amanah dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya dalam rangka mengetahui capaian kinerja dan untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui kewenangannya di bidang pertanian yang diharapkan mampu memberikan manfaat secara nyata di tataran masyarakat, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) yang didalamnya berisi konstelasi perencanaan strategis dan implementasinya serta tolok ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi organisasi.

Sebagai landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;



1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dipercayakan kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal yang terpenting adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai sarana bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyampaikan pertanggung-jawaban informasi kinerja yang terukur kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan berdasarkan target dan realisasi kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain sebagai bahan evaluasi, Laporan Kinerja (LKj) diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk dapat melaksanakan tugas pembangunan di bidang pertanian, secara baik dan benar, sesuai tugas pokok dan fungsi yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat di seluruh Dinas Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Menjadikan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akuntabel, sehingga dapat berperan dalam penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan pemangku kepentingan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap penyelenggara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan tupoksinya diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut.

1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
3. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, serta penyuluhan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



I.4 Sistem Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 berisi seluruh capaian kinerja Dinas selama tahun 2021, dengan tolok ukur seluruh indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang kemudian dilakukan analisis seluruh capaian kinerja, kemudian disimpulkan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan ringkasan tentang latar belakang pembangunan pertanian, tujuan, landasan hukum, kedudukan, tugas dan fungsi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan tentang dokumen perencanaan yang menjadi latar belakang pelaksanaan program, dan kegiatan mulai dari Renstra, Tujuan Strategis, sasaran Strategis, beserta Program dan Kegiatan guna mencapai sasaran dimaksud serta menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang analisis capaian kinerja berdasarkan pengukuran kinerja atas capaian indikator kinerja utama dibandingkan dengan target maupun capaian pada tahun-tahun sebelumnya, serta laporan capaian realisasi anggaran.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan menyeluruh dari seluruh penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dan beberapa saran atau rekomendasi untuk perbaikan kinerja selanjutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan taktis strategis yang berisikan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama lima tahun ke depan (2021-2026). Rencana strategis disusun berdasarkan analisis strategis terhadap potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan yang telah dan akan dihadapi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Oleh karena itu penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 untuk menyelaraskan diri dengan visi, misi dan program Kepala Daerah.

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai tolak ukur dari pencapaian tujuan Pembangunan Pertanian sub sektor tanaman pangan dan horti kulutra di Kabupaten TanjungJabung Barat. Rencana Strategis mengandung Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat petani di Kabupaten TanjungJabung Barat dan berdasarkan pada Visi Bupati TanjungJabung Barat Periode 2021-2026 : “Menuju Tanjung Jabung Barat Yang



Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis Menuju Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis", dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat yang ketiga Periode 2021-2026 : "*Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*".

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam jangka waktu lima tahun ke depan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut.

1. Tujuan

Tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah :

- a. Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dan
- b. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

2. Sasaran

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan sasaran sebagai berikut:

Matriks 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif,	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Hortikultura							



Efisien dan Akuntabel	Akuntabilitas Kinerja									
2	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)							
			- Padi	43.013	43.869	44.742	45.632	46.540	47.467	48.411
		- Jagung	2.522	2.572	2.622	2.674	2.727	2.780	2.835	
		- Kacang Tanah	12	12	13	13	14	14	14	
		- Ubi Kayu	4.647	4.740	4.835	4.931	5.030	5.131	5.233	
		- Ubi Jalar	318	324	330	336	343	349	356	
		Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)								
		- Duku	667	680	693	707	720	734	749	
		- Durian	1.572	1.602	1.633	1.665	1.697	1.730	1.763	
		- Jeruk	1.712	1.746	1.781	1.817	1.853	1.890	1.928	
		- Pisang	26.844	27.378	27.923	28.479	29.045	29.623	30.213	
		- Nenas	110	113	115	118	120	123	126	
		- Jahe	154	157	160	163	166	170	173	

Untuk indikator kinerja dari **Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel** adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan indikator kinerja dari **Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura** adalah Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB dan Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Hortikultura) terhadap PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi, salah satunya ada pada kegiatan usaha pertanian sub sektor tanaman hortikultura. Kontribusi sektor pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari Buku Tanjung Jabung Barat Dalam Angka yang diterbitkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada periode 2021-2026 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju swasembada pangan. Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan pangan dan transformasi ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pembangunan pertanian pangan dan hortikultura diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas SDM pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki SDM yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerja sama dengan pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasis inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian



untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing. Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memerhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua. Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

5.1 Strategi

Strategi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 2021-2026. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian tujuan serta sasaran.

Secara garis besar, program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa dengan cara melaksanakan pertanaman padi dua kali dalam satu tahun (IP-200). Selain itu,



hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari masing-masing kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mendorong pelaku pertanian untuk melakukan tanam padi dua kali (IP-200),
2. Mendorong Pelaku pertanian untuk melaksanakan percepatan tanam padi di Musim Tanam ASEP dan OKMA,
3. Meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
4. Mengembangkan sentra kawasan hortikultura,
5. Mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pusat informasi dan penyuluhan,
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani, dan
7. Mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

5.2 Arah Kebijakan

Memerhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terjaganya luas lahan sawah,
2. Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura,
3. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing tanaman pangan dan hortikultura,
4. Menjaga Keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
5. Meningkatkan kualitas SDM pertanian, dan
6. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.



Matriks 2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Menuju Tanjung Jabung Barat Yang Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis			
Misi III : Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance) Untuk Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya reformasi birokrasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan - Meningkatkan kualitas pengawasan internal	- Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima
Misi IV : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	- <i>Mendorong pelaku pertanian untuk melakukan tanam padi dua kali (IP-200),</i> - <i>Mendorong Pelaku pertanian untuk melaksanakan percepatan tanam padi di Musim Tanam ASEP dan OKMA,</i> - <i>Mengoptimalkan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) sebagai pusat informasi dan penyuluhan,</i> - <i>Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan petani</i> - <i>Mengoptimalkan Program dan Kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat</i>	- <i>Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian</i> - <i>Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian</i> - <i>Peningkatan Penyuluhan Pertanian</i> - <i>Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan dan Petani Pertanian di Kecamatan dan Desa</i> - <i>Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat</i>



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai melalui penilaian berbagai indikator kinerja dengan membandingkan dengan target yang ingin dicapai. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward and punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Permenpan Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan (ditargetkan). Setelah dilakukan



penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang cocok dan relevan untuk meningkatkan kinerja (*performance improvement*) pada tahun berikutnya. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut.

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Indikator Kinerja

- a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut.

SKor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progress negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut.

SKor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 75 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

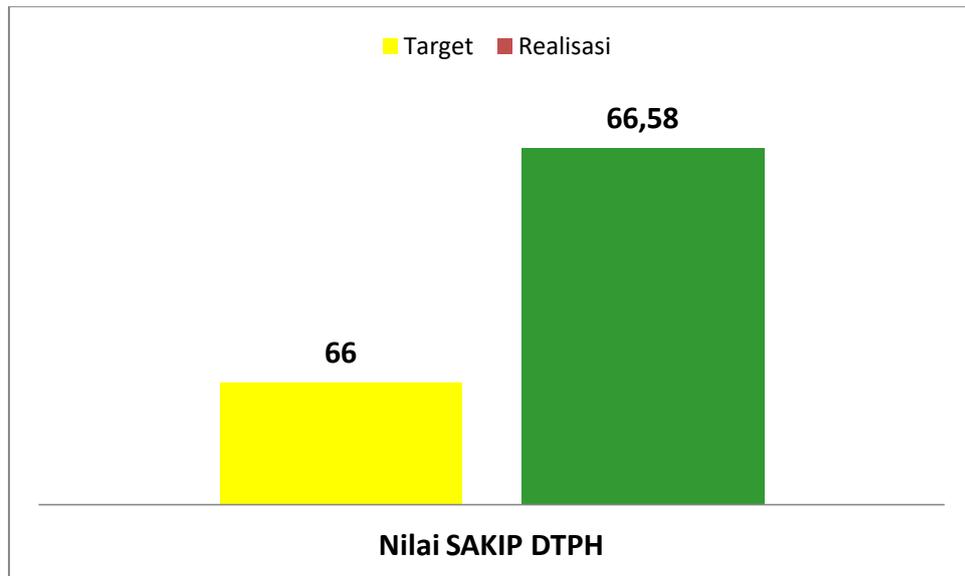
Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka perlu dilakukan Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan sebagai berikut.



Tabel 3.2 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1.	Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	66	66,58	100,88
2.	Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton) - Padi - Jagung - Kacang Tanah - Ubi Kayu - Ubi Jalar	43.869 2.572 12 4.740 324	42.444 1.354 56 4.697 117	96,75 52,64 466,67 99,09 36,11
			Jumlah Produksi Hortikultura (Ton) - Duku - Durian - Jeruk - Pisang - Nenas - Jahe	680 1.602 1.746 27.378 113 157	1.984 1.506 2.264 22.198 197 186	291,76 94,01 129,67 81,08 174,34 118,47

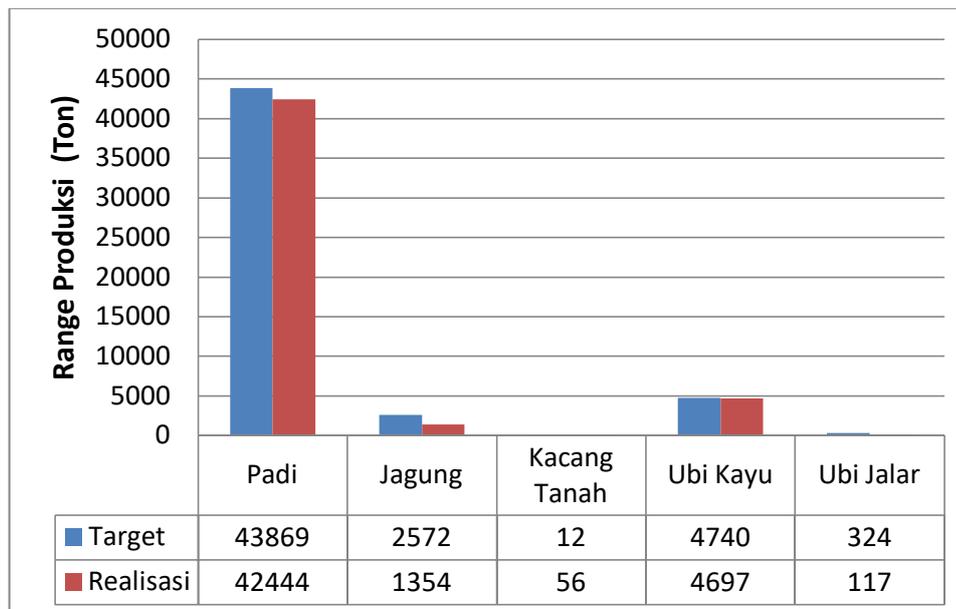
Secara keseluruhan, akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikategorikan "SANGAT BAIK". Untuk indikator kinerja utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, capaian indikator kinerja yang dihasilkan melebihi target (100,88).



Gambar 2.1

Grafik Perbandingan Target Peningkatan Nilai SAKIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 dengan Realisasi Pencapaiannya.

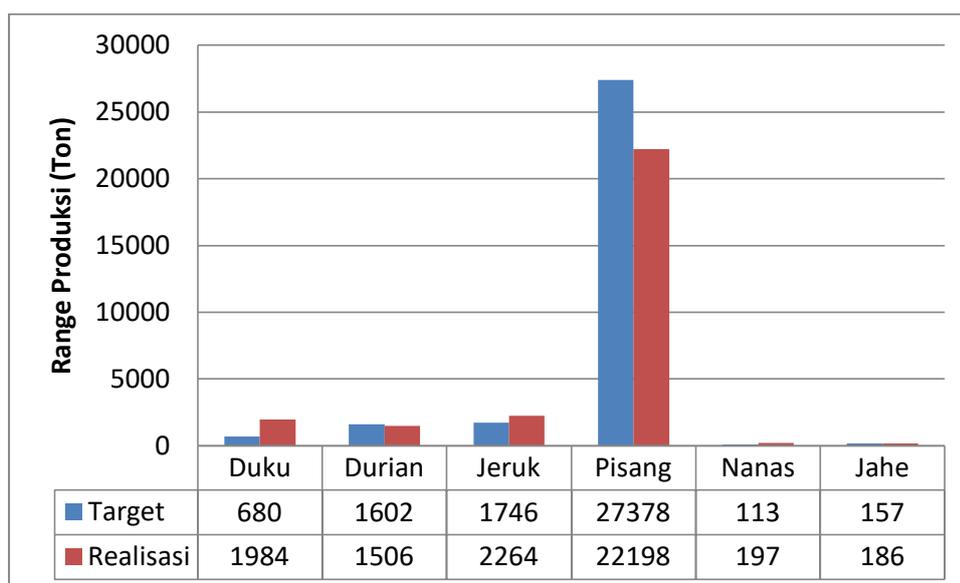
Untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, secara keseluruhan, capaian kinerja yang dihasilkan juga melebihi target (150,25 dengan Kategori SANGAT BAIK). Meskipun target produksi padi tahun 2021 tidak tercapai, akuntabilitas kinerja peningkatan produksi Padi masih dapat dikategorikan "BAIK". Sedangkan untuk indikator peningkatan produksi Jagung, akuntabilitas kinerja nya dikategorikan "KURANG". Untuk indikator peningkatan produksi Ubi Kayu, akuntabilitas kinerja nya dikategorikan "BAIK". Dan untuk indikator peningkatan produksi Ubi Jalar, akuntabilitas kinerja nya dikategorikan ""KURANG".



Gambar 2.2

Grafik Perbandingan Target Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2021 dengan Realisasi Pencapaiannya.

Untuk indikator kinerja utama Peningkatan Produksi hortikultura, secara rata-rata, capaian kinerja yang dihasilkan juga melebihi target (148,22 dengan Kategori SANGAT BAIK). Jumlah produksi Duku, Jeruk, Nanas, dan Jahe pada tahun 2021 melebihi target produksi yang ingin dicapai, sehingga akuntabilitas kinerja peningkatan produksi keempat komoditi hortikultura ini dikategorikan "SANGAT BAIK". Sedangkan untuk indikator peningkatan produksi Durian dan Pisang, akuntabilitas kinerja nya dapat dikategorikan "BAIK".



Gambar 2.3

Grafik Perbandingan Target Peningkatan Produksi Hortikultura Tahun 2021 dengan Realisasi Pencapaiannya.

Dari hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap ketiga indikator kinerja utama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 dikategorikan “**SANGAT BAIK**”.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2021 dengan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi Capaian Tahun 2020	Realisasi Capaian Tahun 2021	Meningkat/ Menurun	Tingkat Capaian (%)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	63,07	66,58	2,61	104,08
2.	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)				
	- Produksi Padi	43.013	42.444	-569	98.677
	- Produksi Jagung	2.522	1.354	-1.168	53.688
	- Produksi Kacang tanah	12	56	44	466.67
	- Produksi Ubi kayu	4.647	4.697	50	101.08
	- Produksi Ubi jalar	318	117	-201	36.792



3.	Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)				
	- Produksi Duku	667	1.984	1317	297,45
	- Produksi Durian	1.572	1.506	-66	95,80
	- Produksi Jeruk	1.712	2.264	552	132,24
	- Produksi Pisang	26.844	22.198	-4.646	82,69
	- Produksi Nenas	110	197	87	179,09
	- Produksi Jahe	154	186	32	120,78

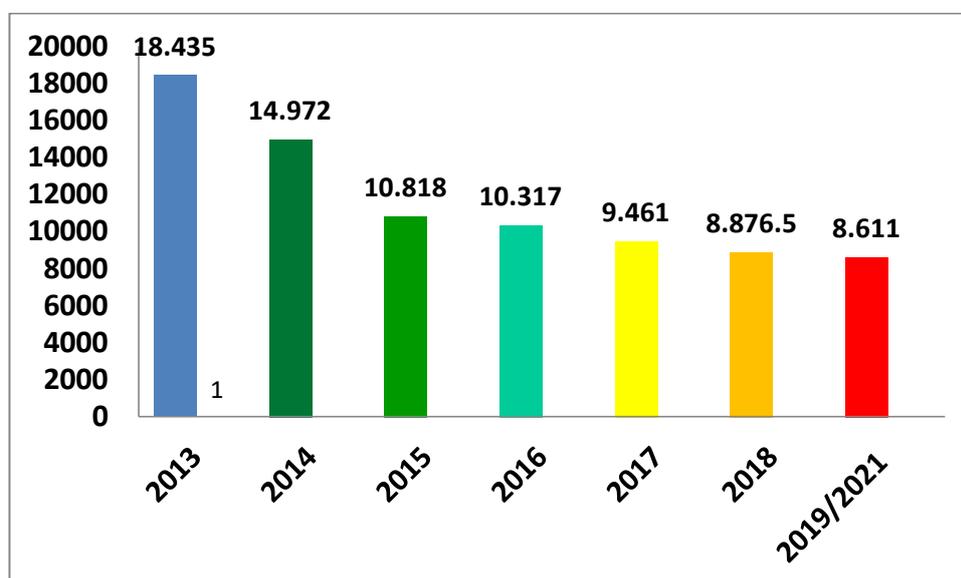
Meskipun pandemi Covid-19 masih terjadi selama Tahun 2021, pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tetap berjalan, karena selain didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga didukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jambi melalui Dana DAK Fisik dan Non Fisik Bidang Pertanian serta Dana Tugas Pembantuan.

Pada tahun 2021, Pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah pusat telah melakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura, seperti : Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura ~ Jeruk 10 Ha, Bantuan Benih Padi Inbrida ~ 1.500 Ha, Bantuan Paket Kacang Tanah ~ 100 Ha, Bantuan Paket Padi Lahan Kering ~ 327,5 Ha, Bantuan Benih Jagung ~ 500 Ha, Bantuan Paket Padi Biofortifikasi ~ 462 Ha, Bantuan Benih Padi Sawah PEN ~ 1.425 Ha, Bantuan Paket Padi Rawa ~ 500 Ha, Bantuan Paket Kedelai PEN ~ 200 Ha, Bantuan Benih Padi Sawah ~ 3.000 Ha, Pembangunan Jalan Pertanian ~ 7 Unit, Pembangunan Embung Pertanian ~ 1 Unit, Rehab Jaringan Irigasi Tersier ~ 29 Unit, Kegiatan Registrasi Kebun/Lahan Komoditas Hortikultura ~ 3 Kelompok Tani, Bantuan Sarana Pascapanen ~ Power Thresher 4 Unit, Bantuan Sarana Pascapanen ~ UPH 1 Unit, Bantuan Sarana Pascapanen ~ CHK 2 Unit, Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam ~ 2 Unit, Pembangunan Jalan Pertanian ~ 3 KM, Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP ~ 8 Unit, Renovasi BPP Kecamatan Tungkal Ilir ~ 1 Unit, Pengembangan Kawasan Jahe ~ 10 Ha, Pengembangan Kawasan Pisang ~ 1,5 Ha, dan Kegiatan Penyuluhan Pertanian.



Tabel. 3.4 Luas Lahan Baku Lahan Sawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2013 s/d 2021.

No.	Kecamatan	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019/2021
1	Tungkal Ilir	805	805	550	417	467	344	344
2	Bram Itam	2.950	1.450	760	815	817	534	534
3	Seberang Kota	737	737	181	155	110	206	142
4	Betara	850	350	229	277	392	415	373
5	Kuala Betara	1.095	721	721	665	405	183	187
6	Pengabuan	3.676	3.238	3.118	2.853	2.426	2.604	2.426
7	Senyerang	4.487	3.893	3.638	3.764	3.216	3.179	3.179
8	Tungkal Ulu	230	230	63	60	81	82	82
9	Batang Asam	1.055	998	998	951	1.069	1.007	1.067
10	Tebing Tinggi	2.500	2.500	500	300	318	200	152
11	Renah Mendaluh	50	50	60	60	160	125	125
Total		18.435	14.972	10.818	10.317	9.461	8.876,5	8.611



Gambar 2.4

Grafik luas baku lahan sawah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 s/d 2021.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggung-jawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan



perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut, perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

Tabel 3.5 Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran	Target & Realisasi Fisik			Daya Serap Keuangan	
			Target	Realisasi	%	(Rp.)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>		<i>6</i>	<i>7</i>
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	2.172.471.565	100	100	100	1.927.260.866	89
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>186.644.000</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100</i>	<i>186.632.000</i>	<i>99,99</i>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.022.000	7 Dok.	7 Dok.	100	57.010.000	99,98
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Belanja Barang dan Jasa	129.622.000	5 Dok.	5 Dok.	100	129.622.000	99,99
B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>11.188.236.371</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100</i>	<i>10.398.958.883</i>	<i>92,95</i>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.049.436.371	94 Orang	94 Orang	100	10.270.558.883	92,95
4	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	6.000.000	18 Orang	18 Orang	100	6.000.000	100
C	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100</i>		<i>94,30</i>
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.700.000	261 Stel	261 Stel	100	95.905.600	94,30
D	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.013.316.065</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100</i>	<i>643.416.808</i>	<i>63,50</i>
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.201.186	12 Bulan	12 Bulan	100	5.201.186	100,00
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.358.004	15 Paket/Buku	15 Paket/Buku	100	101.754.116	94,78
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.175.000	12 Bulan	12 Bulan	100	4.031.000	22,18
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.741.875	36 Paket/Buku	36 Paket/Buku	100	56.373.000	92,81
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100	3.370.000	56,17



11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	815.840.000	12 Bulan	12 Bulan	100	472.687.506	53,94
<i>E</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>40.000.000</i>	<i>6 Unit</i>	<i>6 Unit</i>	100	<i>39.930.000</i>	<i>99,83</i>
12	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	40.000.000	6 Unit	6 Unit	100	39.930.000	99,83
<i>F</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>344.593.500</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	100	<i>325.232.588</i>	<i>94,38</i>
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100	3.000.000	100,00
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.993.500	12 Bulan	12 Bulan	100	93.632.588	82,87
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.600.000	12 Bulan	12 Bulan	100	228.600.000	100
<i>G</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>695.570.000</i>	<i>134 Unit</i>	<i>134 Unit</i>	100	<i>629.143.870</i>	<i>90,45</i>
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.596.000	1 Unit	1 Unit	100	37.720.768	97,73
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.950.000	116 Unit	116 Unit	100	448.459.102	89,17
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.968.000	16 Unit	16 Unit	100	28.908.000	74,18
19	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.056.000	1 Unit	1 Unit	100	115.056.000	100
II	Program Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	591.837.547	100	100	100	566.632.738	95,74
<i>H</i>	<i>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</i>	<i>409.460.119</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	100	<i>385.075.310</i>	<i>94,04</i>
20	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Komoditas, Teknologi dan Spesifikasi Lokasi	355.000.000	10%	10%	100	330.666.560	93,15
21	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	54.460.119	3 Kali	3 Kali	100	54.408.750	99,91
<i>I</i>	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>182.377.428</i>	<i>2%</i>	<i>2%</i>	100	<i>181.557.428</i>	<i>99,55</i>
22	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	182.377.428	2.000 Bibit	2.000 Bibit	100	181.557.428	99,55
III	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.395.858.451	62,55	59,94	95,83	2.631.728.300	77,50
<i>J</i>	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>102.244.600</i>	<i>21</i>	<i>21</i>	100	<i>92.621.400</i>	<i>90,59</i>
23	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	102.244.600	46 Ha	46 Ha	100	92.621.400	90,59



K	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.462.613.851	41,55	41,55	91,67	2.718.681.900	78,52
24	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	855.000.000	3 Unit	2 Unit	66,67	200.000.000	23,39
25	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha tani	700.000.000	3 KM	3 KM	100	700.000.000	100,00
26	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.390.438.851	9 Unit	9 Unit	100	1.364.468.400	98,13
27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	348.175.000	1 Dok	1 Dok	100	274.638.500	78,88
IV	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	69.553.500	100%	100%	100	69.553.500	100
L	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	69.553.500	100%	100%	100	69.553.500	100
28	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	25.200.000	24 Kg	24 Kg	100	25.200.000	100
29	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	44.353.500	2 Kali	2 Kali	100	44.353.500	100
V	Program Penyuluh Pertanian	1.354.460.253	25%	25%	100	1.345.047.103	99,31
M	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	120.265.000	100%	100%	100	118.941.850	98,90
30	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	120.265.000	2 Poktan	2 Poktan	100	118.941.850	98,90
31	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.234.195.253	12 Bulan	12 Bulan	100	1.226.105.253	99,34
Total		19.150.769.687			99,17	17.111.761.390	89,35

Dari tabel di atas, Realisasi keuangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 hanya mencapai 89,35%. Pencapaian realisasi keuangan sebesar 89,35% ini disebabkan karena :

1. Adanya refocusing anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang pada awalnya pagu anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini dianggarkan sebesar Rp. 11.188.236.371. Dimana, refocusing anggaran pada Kegiatan ini mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan perubahan mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 hingga mengalami 3 (tiga) kali Mendahului Perubahan. Realisasi



- anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah adalah sebesar 10.398.958.883 atau sebesar (92,95%). Sisa anggaran pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ini adalah sebesar Rp. 778.877.488.
2. Adanya penghematan anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dimana, anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini direncanakan sebesar Rp. 815.840.000. Dan realisasi anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah sebesar 472.687.506 atau sebesar (57,94%). Salah satu penyebab efisiensi/penghematan anggaran pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ini karena pada Tahun 2021 pandemi Covid-19 masih berlangsung yang menyebabkan semua aktivitas menjadi terbatas (adanya pembatasan bahkan pelarangan masuk ke suatu wilayah/daerah).
 3. Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam pada Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) unit dengan anggaran sebesar Rp. 285.000.000 per unit nya. Setelah diverifikasi, pekerjaan Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam ini hanya dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) unit saja dan anggaran yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Pembangunan Sumber Irigasi Air Tanah Dalam ini hanya sebesar Rp. 100.000.000 per unit nya. Sehingga, dari total pagu anggaran Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani yang sebesar Rp. 855.000.000, realisasi keuangannya hanya sebesar Rp. 200.000.000 (23,39%). Sisa anggaran pada Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani ini adalah sebesar Rp. 655.000.000.
 4. Adanya efisiensi anggaran pada beberapa kegiatan rutin/wajib maupun pada program dan kegiatan urusan pilihan.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, disusun sebagai gambaran dari pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan berdasarkan target dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat pada awal tahun. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna mengawal pembangunan di bidang pertanian sub sector tanaman pangan dan hortikultura Tahun 2021. Laporan ini sekaligus dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 sesuai Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 dikategorikan **“SANGAT BAIK”**.

Selain beberapa keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaannya masih banyak kendala, diantaranya adalah masih banyaknya infrastruktur pengairan yang belum memadai, infrastruktur penunjang yang kurang seperti jalan usaha tani, semakin berkurangnya lahan pertanian yang diakibatkan konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, penggunaan pupuk yang masih belum taat azas 6 tepat (jumlah, jenis waktu, harga, tempat, mutu), menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian, kurangnya penggunaan benih unggul, terbatasnya jumlah penyuluh pertanian, terbatasnya pengetahuan petani, dll. Namun demikian pemecahan dan evaluasi pada setiap tingkat dan tahapan untuk mencapai



keberhasilan target kinerja harus selalu dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan, diantaranya adalah :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mencapai sasaran demi mewujudkan tujuan organisasi dengan cara menempatkan sesuai kemampuan dan mengarahkan para pegawai sesuai tugas pokok dan fungsimasing-masing.
2. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi di bidang pertanian,dimulai dari aspek penyediaan agribisnis, aspek budidaya (onfarm), aspek pascapanen dan pemasaran (hilir)serta beberapa aspek pendukung lainnya.
3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana lahan dan air demi meningkatkan hasil produksi usahatani.

Mengingat pentingnya sector pertanian dalam perekonomian di Kabupaten Tanjung JabungBarat, sudah selayaknya jika Pemerintah Daerah memberikan porsi anggaran yang mencukupi dan memadai guna mensukseskan program swasembada pangan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021disusun, mengingat luasnya aspek dan unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, tentu komitmen, kerja keras, dan kerjasama dari pemerintah swasta, petani, menjadi kunci kesuksesan pembangunan pertanian di masa mendatang.